

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	10
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	10
Pendapatan - LRA	10
Belanja	10
Pendapatan - LO	10
Beban	11
Aset	13
Kewajiban	16
Ekuitas Dana	16
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	17
BAB IV	
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	18
BAB V	20
PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Parakan Kauman sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 13);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2024, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD**
- BAB V : PENUTUP**

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Kelurahan Parakan Kauman dalam merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD. Kelurahan Parakan Kauman telah mengalami perubahan anggaran sehingga diperoleh anggaran akhir sebagai berikut:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

KODE	REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	5	BELANJA DAERAH	913.905.000	983.905.000	70.000.000	7,65%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	51	BELANJA OPERASI	908.905.000	975.905.000	70.000.000	7,7%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	52	BELANJA MODAL	5.000.000	8.000.000	0	0%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.210.000	133.210.000	0	0%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000	27.000.000	-3.000.000	-10%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	1.000.000	-2.000.000	66,67%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	7.01.01.2.06.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	1.000.000	-2.000.000	66,67%
7.01.0.00.0.00.05.00.01-	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	7.500.000	0	0%

7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	7.500.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	5.500.000	-1.000.000	-15,38%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000	5.500.000	-1.000.000	-15,38%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.08-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	-0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	8.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 6.09-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.210.000	90.210.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	0%

7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.210.000	73.210.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 8.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	73.210.000	73.210.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	8.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000	5.500.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 9.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	5.500.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	2.500.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 9.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	8.000.000	+3.000.000	+60%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.01.2.0 7.06-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000	8.000.000	+3.000.000	+60%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	355.669.400	355.669.400	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	355.669.400	355.669.400	0	0%

7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80.000.000	80.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.03.2.0 2.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	0%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	780.695.000	850.695.000	+70.000.000	8,96%
7.01.0.00. 0.00.05.00 01-	7.01.03.2.0 2.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	780.695.000	850.695.000	+70.000.000	8,96%

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KELURAHAN PARAKAN KAUMAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	6.000.000	11.550.000	192,5
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Lain-lain PAD yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.000.000	11.550.000	192,5

Dari tabel diatas secara keseluruhan realisasi pendapatan melebihi target pendapatan.

REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD**KELURAHAN PARAKAN KAUMAN****TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	BELANJA OPERASI	Rp 975.905.000	Rp 937.157.105	96,03
1.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 975.905.000	Rp 937.157.105	96,03
	BELANJA MODAL	Rp 8.000.000	Rp 7.200.000	90
1.	BELANJA MODAL DAN PERALATAN MESIN	Rp 8.000.000	Rp 7.200.000	90
	JUMLAH BELANJA	Rp 983.905.000	Rp 944.357.105	95,98

Dalam pelaksanaan APBD 2024 realisasi belanja Kelurahan Parakan Kauman mencapai 95,98 % atau Rp 944.357.105, dari Anggaran yang disediakan/ yang ditetapkan sebesar Rp 983.905.000, yang terperinci belanja Barang dan Jasa tercapai 96,03% atau Rp 937.157.105, dari anggaran yang disediakan Rp 975.905.000. Sedangkan belanja modal tercapai 95,98 % atau Rp 7.200.000, dari anggaran yang disediakan Rp 8.000.000.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah pergantian KPA dan sistem SIPD yang saling berkaitan sehingga dalam pencairan sering terjadi keterlambatan dari rencana penarikan kas karena harus menunggu SK dan juga pergantian akun baik itu di sistem SIPD maupun di sistem Pengadaan barang dan jasa..

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan daerah mencapai Rp 11.550.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.

3.1.2. Belanja

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
Belanja Barang dan Jasa	Rp 975.905.000	Rp 937.157.105
Belanja Modal	Rp 8.000.000	Rp 7.200.000
Jumlah	Rp 983.905.000	Rp 944.357.105

a. Belanja Barang dan jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 937.157.105, atau 96,03 % dari anggaran sebesar Rp 975.905.000.

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 7.200.000, Atau 95,98 % dari anggaran sebesar Rp 8.000.000.

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan daerah mencapai Rp 11.550.000, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6.000.000.

3.1.4. Beban

8	BEBAN DAERAH	917.352.663,00
81	BEBAN OPERASI	917.352.663,00
8102	Beban Barang dan Jasa	917.352.663,00
810201	Beban Barang	414.254.174,00
81020101	Beban Barang Pakai Habis	414.254.174,00
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	181.442.000,00
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.248.794,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	53.572.600,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.513.030,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.295.000,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.591.750,00
810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	88.000,00
810201010039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	56.000.000,00
810201010040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	50.300.000,00

810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	48.953.000,00
810202	Beban Jasa	498.264.489,00
81020201	Beban Jasa Kantor	492.922.044,00
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	99.060.000,00
810202010007	Beban Honorarium Rohanwan	19.200.000,00
810202010013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	3.600.000,00
810202010016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	126.000.000,00
810202010026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	217.536.000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	17.600.000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	4.248.450,00
810202010060	Beban Tagihan Air	981.950,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	4.468.144,00
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	227.500,00
81020202	Beban Luran Jaminan/Asuransi	3.342.445,00
810202020005	Beban Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.943.725,00
810202020006	Beban Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	177.205,00
810202020007	Beban Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	221.515,00

810203	Beban Pemeliharaan	3.810.000,00
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.810.000,00
810203020038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.360.000,00
810203020405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.450.000,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	3.024.000,00
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.024.000,00
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3.024.000,00

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara Kas	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
Kas dan Setara Kas		
a. Kas di Bank	Rp 0	Rp 0
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 1.778.000	Rp 0
Disetor ke kas Daerah	<u>Rp 1.778.000</u>	<u>Rp 0</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp 0	

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0 dana yang masih berada di bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp 0

a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Parakan Kauman per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,

c. Disetor ke Kas Daerah

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 disetor ke Kas Daerah Rp 1.778.000.

2. Piutang

Per 31 Desember 2024

a. Saldo Piutang lain-lain

Tahun Anggaran 2024

Piutang Sewa Balai Kelurahan	Rp 0
Jumlah piutang lain-lain	Rp 0

3. Persediaan

Per 31 Desember 2024	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023
a. Bahan Lainnya	Rp 132.500	Rp 0
b. Kertas dan Cover	Rp 180.000	Rp 520.000
c. Benda Pos	Rp 30.000	Rp 300.000
d. Alat Listrik	Rp 30.000	Rp 0
e. Perabot Kantor	Rp 0	Rp 88.000
f. Alat Tulis Kantor	Rp 0	Rp 35.000
g. Bahan Komputer	Rp 0	Rp 403.750
Jumlah Persediaan	Rp 372.500	Rp 1.346.750

4. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
a. Tanah	Rp 8.212.213.988	Rp 8.212.213.988
b. Peralatan dan Mesin	Rp 286.355.598	Rp 279.155.598
c. Gedung dan Bangunan	Rp 2.799.157.030	Rp 2.799.157.030
d. Asset Tetap Lainnya	Rp 9.950.000	Rp 10.016.500
e. Properti dan Investasi	Rp 4.517.885.196	Rp 0
f. Aset Lainnya	Rp 9.950.000	Rp 10.016.500

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Aset Tetap Tanah sebesar Rp 8.212.213.988

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 286.355.598 terdiri dari:

Alat Besar	Rp 15.000.000
Alat Angkutan	Rp 34.832.000
Alat pertanian	Rp 600.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 129.410.598
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp 6.300.000
Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp 10.302.000
Komputer	Rp 89.911.000

terjadi penambahan nilai asset peralatan dan mesin sebesar Rp 7.200.000 atas pembelian belanja modal personal computer.

c. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan Kelurahan Parakan Kauman adalah Rp 2.799.157.030.

d. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 berupa Gordon, Buku perpustakaan, Buku Geger doortoot, Kursi dan Flashdisk sejumlah Rp 10.016.500 terjadi penurunan rekas ke asset lainnya berupa

buku geger doorstoot Rp 66.500, sehingga saldo akhir tahun 2024
Rp 9.950.000

e. Aset lainnya

Nilai aset lainnya tahun 2023 Rp 9.160.000 pada tahun 2024 terjadi
penambahan dari reklas aset lainnya sebesar Rp 66.500 sehingga
nilai aset lainnya akhir tahun 2024 Rp 9.226.500

3.1.6. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2024 di Kelurahan Parakan Kauman ada
kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang sebesar Rp
6.249.424 yang terdiri dari utang belanja jasa tenaga administrasi Rp
3.828.000, utang belanja jasa tenaga kebersihanRp 1.600.000 sebesar
dan utang belanja jasa kantor Telephon Rp 358.200, Air Rp 27.900, Listrik
Rp 435.324.

	Tahun 2024	Tahun 2023
a. Utang Jasa Administrasi	Rp 3.828.000	Rp 3.750.000
b. Utang Jasa Kebersihan	Rp 1.600.000	Rp 0
c. Utang Belanja Jasa Keamanan	Rp 0	Rp 1.500.000
c. Utang Belanja Jasa Telepon	Rp 358.200	Rp 352.650
d. Utang Belanja Jasa Listrik	Rp 435.324	Rp 346.092
e. Utang Belanja Jasa Air	Rp 27.900	Rp 144.600

3.1.7. Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana Lancar

Jumlah Aset lancar Rp 372.500

Aset Lancar berupa cadangan persediaan (Kertas dan Cover, ATK, Benda
Pos, dan alat listrik).

2. Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Investasi permanen Rp 0,00

Jumlah Aset Tetap Rp 11.307.676.616

Aset lancar Rp 372.500

Properti investasi Tanah Rp 4.571.885.196

Jumlah Aset lainnya Rp 9.226.500 +

Jumlah Asset	Rp	15.889.160.812
Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	Rp	<u>6.249.424-</u>
Jumlah Kewajiban	Rp	6.249.424
Jumlah Ekuitas	Rp	<u>15.882.911.388</u>

Jadi Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban Kelurahan Parakan Kauman adalah Rp 15.882.911.388

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

3.2.1. Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD

Urutan	Anggaran	LRA	Beban LO	Utang Belanja
Pendapatan	6.000.000	11.550.000	0	0
Belanja Operasi	975.905.000	937.157.105	938.287.437	0
Belanja Modal	8.000.000	7.200.000	0	0
Belanja Barang dan Jasa	975.905.000	937.157.105	938.287.437	6.249.424

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan keuangan, Kelurahan Parakan Kauman berdomisili di Jalan Raya Saubari No. 74 (0293) 596448 Kode Pos 56254, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Penjelasan Ringkas Sifat Operasi Entitas/Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di SKPD Kelurahan Parakan Kauman Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020.

3. Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Parakan Kauman

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Parakan Kauman adalah sebagai berikut:

Lurah	: ARIEF MUJIONO, S. Sos
Sekretaris Lurah	: BILAL ARIFIN, S.M
Bendahara	: SAFAAT SAM SUL ALAM
Staff	: KUSMARTONO
Staff	: ARIEF MAKRUF

4. Pemerintahan Desa

Di Kelurahan Parakan Kauman terdapat 16 RW dan 74 RT dengan rincian sebagai berikut:

1. RW. 001 Tejosari	9. RW. 009 Jogomertan
2. RW. 002 Sidorjo	10. RW. 010 Klewogan
3. RW. 003 Jetis Lor	11. RW. 011 Karangtengah
4. RW. 004 Jetis Kidul	12. RW. 012 Jetis Kauman
5. RW. 005 Karangsari	13. RW. 013 Coyudan Selatan
6. RW. 006 Karangsari	14. RW. 014 Coyudan Utara
7. RW. 007 Besarani	15. RW. 015 Sekrikil
8. RW. 008 Jogomertan	16. RW. 016 Situk Coyudan Utara

5. Letak Geografis

Kelurahan Parakan Kauman merupakan salah satu dari 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Parakan, beralamat di Jalan Saubari No. 74 Parakan. Pada bagian Barat berbatasan dengan Desa Ringinanom dan, Utara berbatasan dengan Desa Manden, serta pada bagian Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakan Wetan dan Selatan berbatasan dengan Desa Sanggen. Luas kelurahan Parakan Kauman adalah 108,3 ha. Secara administratif, Kelurahan Parakan Kauman terbagi menjadi 16 RW, dan 74 RT.

BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2024 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketataan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 02 Januari 2025
LURAH PARAKAN KAUUMAN
Selaku

Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran /Barang


ARIEF MUJIONO, S.Sos
NIP. 19820123 201001 1 003